

POLITIK DINASTI DALAM KEPEMIMPINAN DESA

Wijoko Lestariono

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya
(email: wijokolestariono@gmail.com)

Abstrak

Politik dinasti merupakan suatu proses regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan elit politik yang bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara menempatkan keluarga atau kerabatnya pada posisi tertentu dalam bidang pemerintahan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya politik dinasti dalam kepemimpinan desa di Desa Mekar Jaya, (2) Apa dampak politik dinasti dalam kepemimpinan desa bagi pembangunan masyarakat di Desa Mekar Jaya.

Untuk menjawab permasalahan diatas penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang yang terdiri dari perangkat desa, tokoh agama, serta warga masyarakat setempat. Adapun tujuan dalam penelitian yaitu untuk mengetahui: (1) Faktor penyebab terjadinya politik dinasti dalam kepemimpinan desa di Desa Mekar Jaya. (2) Dampak politik dinasti dalam kepemimpinan desa bagi pembangunan masyarakat di Desa Mekar Jaya.

Kata Kunci : *Politik Dinasti, Kepemimpinan Desa*

Pendahuluan

Pada masa Orde Baru membawa dampak yang sangat signifikan terhadap perubahan sistem politik dan pemerintahan di Indonesia, salah satunya ditandai dengan liberalisasi politik tingkat nasional dan tingkat lokal, artinya sistem politik Indonesia mengalami perubahan dari sistem politik non demokrasi menjadi demokratis. Namun perubahan ini tidak serta merta mengakhiri sistem politik lama yang lahir dan berkembang pada masa orde baru. Politik dinasti ialah sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait

dalam hubungan keluarga atau kerabat dekat.

Pada dasarnya politik dinasti memunculkan banyak pro dan kontra. Sebagian ada yang menganggap baik karena kesetabilan politik terjaga dan sebagian pula ada yang menganggap bahwa politik dinasti hanyalah alat yang digunakan para pejabat untuk melanggengkan kekuasaannya, selain itu politik dinasti dapat mempersempit kesempatan bagi orang lain untuk berpartisipasi dalam lembaga perpolitikan, karena biasanya calon pemimpin hasil dari politik dinasti lebih banyak dukungan. (Bambang Cipto: 1999).

Menurut Leo Agustino politik dinasti adalah suatu “kerajaan politik” dimana elit menempatkan keluarga, saudara, dan kerabatnya di beberapa posisi penting dalam pemerintahan baik lokal ataupun nasional, atau bisa dikatakan elit membentuk strategi semacam jaringan yang terstruktur dan sistematis. (Leo Agustino: 1999). Politik dinasti atau politik kekeluargaan mempunyai ciri khusus, yaitu memainkan peran utama dalam pemerintahan tingkat atas sementara rakyat hanya memilih bermain dibelakang. Dalam politik ini nyaris tidak ada tempat bagi politisi yang tidak memiliki jalinan kekeluargaan atau kekerabatan.

Politik dinasti menghilangkan kesetaraan yang menjadi salah satu nilai penting dalam demokrasi. Sistem politik yang demokratis yang dihadirkan oleh Orde Baru, justru memberi ruang tumbuh dan berkembangnya politik dinasti, seperti yang dijumpai di Desa Mekar Jaya. Desa Mekar Jaya merupakan salah satu desa yang berada di daerah Kecamatan Parenggean. Desa Mekar Jaya terkenal dengan tingginya rasa kekeluargaan. Memungkinkan menjadikan seorang pemimpin dari setua keluarga yang memiliki pengaruh dari keluarga yang kuat, sistem politik yang ada di Desa Mekar Jaya memperlihatkan adanya sifat kekeluargaan.

Kekuasaan politik tersebut diadakan secara demokrasi, pemilihan secara demokrasi memberikan wewenang yang besar bagi masyarakat dalam memilih calon pemimpinnya, dimana masyarakat dapat menentukan calon pemimpinnya secara langsung sesuai dengan kehendaknya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Politik Dinasti dalam

Kepemimpinan Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya politik dinasti di Desa Mekar Jaya, pemilihan kepala desa diadakan secara langsung dan terbuka.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena sosial yang ada di masyarakat. dalam fenomena-fenomena sosial tersebut menurut penelitian tidak dapat dijelaskan dalam bentuk angka-angka melalui metode penelitian kuantitatif. Metode kualitatif ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Hasil dan Pembahasan

A. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Politik Dinasti

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia pemerintah desa merupakan unit pemerintahan terendah yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Kepala desa merupakan seorang yang telah dipilih secara demokrasi melalui pemilihan langsung oleh masyarakat setempat yang telah memiliki hak suara berdasarkan peraturan yang ada. Kepala desa memiliki wewenang yang besar dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Dalam pelaksanaannya, seorang kepala desa dibantu oleh beberapa perangkat desa seperti kepala urusan, kepala desa, serta BPD mereka saling menjalin relasi dengan satu sama lain.

Relasi merupakan suatu hubungan yang terjalin oleh seorang dengan orang lain maupun seseorang dengan suatu

lembaga (Kartini Kartono, 2010). Dalam setiap relasi memiliki suatu hubungan yang terjalin dengan baik. Misalnya saja dalam pemerintahan desa seorang kepala desa juga memiliki masa jabatan tertentu dan akan berhenti menduduki jabatan tersebut. Kepala desa yang sudah habis masa jabatannya ini biasanya disebut dengan mantan kepala desa. Sepanjang pemerintahan desa di Desa Mekar Jaya telah terjadi pergantian kepala desa beberapa kali.

Desa Mekar Jaya sendiri memiliki beberapa mantan kepala desa yang dikenal oleh masyarakat desa yaitu Suwaji, Nadia, Imam Sobirin, Ds Suparli, Siyono, dan Seto Hadi. Sepanjang pemerintahan Desa Mekar Jaya telah terjadi pergantian kepala desa beberapa kali. Salah satunya mantan kepala desa yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan kepala desa sekarang pada tahun 2006 hingga saat ini. Pemilihan kepala desa yang baru dilakukan pada Tahun 2018, namun peralihan kekuasaan desa yang sah adalah ketika pelantikan dilaksanakan. Politik kekerabatan atau Politik dinasti adalah suatu regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan elit politik tertentu yang bertujuan untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan berdasarkan kekerabatan. Salah satu praktek politik kekerabatan yang sedang berjalan saat ini dijumpai di desa Mekar Jaya, dimana telah terjadi upaya mempertahankan kekuasaan oleh keluarga kepala desa, adapun faktor yang menyebabkan terjadinya politik dinasti ialah sebagai berikut:

1. Kekuatan Modal (Ekonomi)

Modal ekonomi dapat dikatakan sebagai pertimbangan dalam penyalonan untuk menjadi pemimpin. Kekayaan yang dimiliki seseorang sangat berpengaruh dalam masyarakat sebagai modal dasar untuk mencapai suatu tujuan atau

kemenangan. Hasil wawancara dengan Daryono selaku masyarakat desa setempat sebagai berikut:

“Melihat latar belakang keluarga kepala desa memang terbilang mampu secara ekonomi, Kepala desa juga memiliki pekerjaan yang memang memiliki penghasilan yang terbilang cukup. Ia berkerja dalam bidang perkebunan, memiliki tanah perkebunan yang lumayan luas”.

Penulis, menemukan berdasarkan dari hasil penelitian bahwa Kemampuan ekonomi seorang kepala desa juga menjadi pertimbangan dalam pencalonan, menjadi kepala desa tidak cukup dengan modal kemampuan dalam bidang politik saja melainkan juga memiliki kemampuan secara ekonomi. Dengan adanya penguasaan sumber-sumber ekonomi atau kekayaan yang dimiliki kepala desa menunjukkan kelas mereka sangat mempengaruhi masyarakat. Maka mudah bagi mereka untuk memperoleh simpati atau dukungan dari masyarakat setempat untuk mencapai suatu tujuan atau kemenangan.

2. Kekuatan Jaringan

Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan, keluarga merupakan lembaga sosial inti. Keluarga dibagi menjadi dua yaitu keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak serta keluarga luas yang merupakan kumpulan keluarga inti yang saling berhubungan karena sedarah dan hidup bersama. Jaringan politik keluarga di sebabkan adanya unsur relasi penguasa dengan satu jaringan tersebut yang melihat pada perspektif kepentingan. Kepentingan adalah salah satu kunci dalam membentuk

sebuah relasi menuju sebuah pertukaran sosial dalam sebuah kekuasaan.

Jabatan tertinggi dari pemerintahan baik tingkat pusat maupun tingkat desa merupakan usaha untuk memperoleh kekuasaan. Strategi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mempertahankan apa yang telah dimiliki atau yang dikehendakinya. Berbagai cara digunakan ketika kita menghendaki apa yang kita inginkan, cara yang ditempuh bermacam-macam. Misalnya saja dalam desa dilakukan berbagai strategi untuk mempertahankan kekuasaannya. Dalam pemerintahan desa di Desa Mekar Jaya kepala desa memiliki strategi tertentu dalam melanggengkan kekuasaannya. Menurut hasil wawancara dengan Suyatno selaku masyarakat desa setempat sebagai berikut:

“Jabatan kepala desa sebelumnya dijabat oleh keluarga Siyono, hubungan yang dimiliki kepala desa dengan mantan kepala desa sebelumnya yang tidak lain merupakan om dari kepala desa sekarang, Bentuk kekuasaan yang dijalankan oleh kepala desa adalah dengan adanya penguasaan jabatan penting di desa seperti Kas Pemerintahan, Kaur Kesra, Rt, ketua Rw, dan Kaur Umum yang masih memiliki kekerabatan”.

Pengaruh mantan kepala desa sangat besar dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Ada beberapa pernyataan bahwa keberhasilan kepala desa ini adari dukungan keluarga dalam kepemimpinan desa. Seperti hasil wawancara dengan Suyatno selaku masyarakat desa setempat sebagai berikut:

“Keluarga kepala desa memang memiliki pengaruh yang cukup besar. Seperti mantan kepala desa Siyono merupakan tokoh agama dan Suroto merupakan orang yang cukup disegani di masyarakat.

memang sudah dari dulu keluarga mereka menjadi kepala desa tidak heran jika pengaruh keluarga cukup besar dalam meraih kemenangan”.

Maurer menyebutkan tentang birokrasi desa, bahwa jabatan kepala desa yang ada di pedesaan Parenggean dimonopoli oleh keluarga mantan kepala desa. Ia juga menyebutkan bahwa nepotisme tersebar luas di pedesaan Parenggean. Praktek kewarisan dan juga munculnya “dinasti lokal” pada birokrat desa yang memonopoli berbagai kedudukan dalam urusan pengelolaan masyarakat. jabatan-jabatan penting di desa biasanya dipegang oleh orang-orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan kepala desa. Terbukti dengan adanya jabatan kepala desa yang dimulai dari Pemerintahan, Kaur Kesra, Rt, ketua Rw, dan Kaur Umum yang masih memiliki hubungan kekerabatan.

3. Demokrasi tidak sehat

Dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum banyak terjadi kecurangan salah satunya berupa uang atau barang lainnya. Politik uang adalah sesuatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang agar menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Politik uang dilakukan dengan cara-cara yang lebih tersktuktur dengan melibatkan pihak-pihak tertentu, uang ialah sebagai modal dasar untuk meraih kemenangan. Disini calon kepala desa memainkan sumber kekuasaannya itu untuk memperoleh dukungan sebanyak-banyaknya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Madi selaku masyarakat desa setempat sebagai berikut:

“Pada tanggal 15 Desember 2018 dilakukan pemilihan Pilkades, yang terdiri dari dua calon. Dalam

masa kampanye berlangsung terdapat kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh mantan kepala desa, sebagian masyarakat ada yang mendapatkan transaksi berupa uang”.

Penulis, menemukan berdasarkan dari hasil penelitian bahwa pada masa kampanye merupakan kesempatan yang sangat dimanfaatkan oleh masing-masing calon yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan. Tidak jarang banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi pada masa kampanye berlangsung.

Kekuasaan menjadi hal sangat penting dalam sebuah kepemimpinan, kekuasaan yang dimiliki seseorang dapat mempertahankan posisinya dimana dia menjalankan kekuasaannya, berbagai cara ditempuh oleh kepala desa dalam mempertahankan kekuasaan. Sebenarnya politik uang merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh calon pemimpin dengan memberi suap yang terjadi sejak calon mendaftarkan diri sebagai partai politik hingga ke masa kampanye memberikan janji atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Karena mereka lahir dari keluarga yang telah mapan, kebanyakan politik keluarga (politik dinasti) hanya ingin melanggengkan kekuasaannya.

B. Dampak Politik Dinasti Bagi Pembangunan Masyarakat

Dalam politik dinasti keluarga atau kerabat dekat merupakan alat yang tepat untuk membentuk kekuasaan yang kuat. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan yang diinginkan oleh pemberi perintah. Dalam pemerintahan desa juga memiliki suatu kekuasaan yang dijalankan oleh kepala

desa sebagai pemegang jabatan tertinggi di desa. Agar kekuasaan tersebut tetap berada dipihaknya, mereka mempertahankan kekuasaan dengan cara mecalonkan istri, anak, dan kerabat-kerabat lainnya untuk terlibat dalam suatu pemerintahan.

Kepala Desa Mekar Jaya yang sedang menjabat adalah Seto Hadi memiliki kerabat terhadap kepala desa yang terdahulu. Jika kekuasaan terus berada dalam ranah keluarga dikhawatirkan kekuasaan tersebut tidak mampu membawa perubahan sosial maupun ekonomi. Adapun dampak negatif dari politik dinasti atau politik keluarga seperti: korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dan perencanaan pembangunan buruk. Hasil wawancara dengan Darmanto selaku masyarakat desa setempat sebagai berikut:

“Bangunan-bangunan di Desa Mekar Jaya sudah ada sejak dulu. Sebagain bangunan-bangunan tersebut sudah difungsikan lagi, seperti pukesmas, bantuan air bersih, dan jembatan rusak. Bangunan-bangunan tersebut hingga saat ini mulai sedikit-sedikit ada pembenahan atau renovasi.”

Penulis, menemukan berdasarkan dari hasil penelitian bahwa kekuasaan yang masih terkait hubungan keluarga sebenarnya sangat merugikan masyarakat, selain akan menghambat pembangunan dan dikhawatirkan kekuasaan tersebut tidak mampu membawa perubahan sosial maupun ekonomi.

Seiring dengan perkembangan zamam, sebagian masyarakat sadar akan pentingnya tingkat pendidikan. Namun kesadaran masyarakat akan tingkat pendidikan tidak seiring dengan krisisnya mereka dalam menghadapi situasi

kepemimpinan desa yang demikian. Adanya dominasi kepemimpinan desa oleh keluarga kepala desa tidak membuat masyarakat sadar dan kemudian melakukan perubahan. Ketika tingkat pendidikan semakin tinggi seharusnya masyarakat juga harus semakin kritis terhadap hal tersebut. Seperti hasil wawancara dengan Sugi selaku masyarakat desa setempat sebagai berikut :

“Jabatan perangkat desa sebagian diduduki oleh orang yang tidak memiliki kopeten dalam hal kepemimpinan, semua itu disebabkan rendahnya tingkat pendidikan seperti Kaur Umum, Kaur Pemerintahan, Rt, Kadus, Kas Pemerintahan Hanya lulusan SPM dan SMA”.

Rendahnya pendidikan aparat pemerintahan desa juga menjadi faktor penentu kualitas pelayanan publik yang diberikan. Pelayanan publik merupakan pemberian pelayanan (melayani) dan untuk mensejahterakan masyarakat. Pelayanan yang diberikan dapat berupa barang maupun jasa yang menjadi tanggung jawab dan dijalankan oleh aparatur pemerintahan desa yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat setempat. Dalam politik dinasti politik kekuasaan dari pada melayani masyarakat. Seperti hasil wawancara dengan Sugi selaku masyarakat desa setempat sebagai berikut :

“Mengenai pelayanan yang diberikan oleh kepala desa dan aparatur desa terbilang kurang, dalam pembuatan surat seperti KK dan surat-surat lainyamelalui prosese yang cukup lama tidak jarang sebagian masyarakat terpaksa mengeluarkan uang untuk

melancarkan surat-surat tersebut, dan mereka salingmelimpahkan wewenang satu sama lain.”

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa, kepala desa dibantu oleh beberapa perangkat desa dalam melayani masyarakat dengan baik. Namun rendahnya pendidikan dan pengalaman menjadi faktor penentu kualitas pelayanan yang diberikan. Berbeda dengan pelayanan yang diberikan oleh mantan kepala desa sebelumnya. Seperti hasil wawancara dengan Sugi selaku masyarakat desa setempat sebagai berikut :

“sikap mantan kepala desa sebelumnya memiliki sifat yang baik, dia sangat respon terhadap bawahannya (perangkat desa). selain itu dia juga mengajarkan disiplin kerja kepada perngkat desa, mereka mengutamakan gotong royong, dalam melaksanakan pembangunan cukup baik seprti renofasi pasar dan masjid. Pelayanan yang diberikan oleh aparat desapun sangat baik dalam pembuatan surat dan lain-lain”.

Penulis, menemukan berdasarkan dari hasil penelitian bahwa sikap yang ditunjukkan oleh mantan kepala desa sangat berbeda dengan kepala desa Bukit Harapan. Mantan kepala desa dalam masa pemerintahannya memang cukup baik, dia menciptakan suasana kerja yang nyaman bagi para perangkatnya yang membiasakan ke kantor balai desa serta pembagian jadwal piked. Suasana yang diciptakan membuat para perngkat lebih nyaman dalam bekerja.

Politik dinasti akan merusak tatanan demokrasi sebab pemerintahan

yang berasal dari keluarga atau kerabat sebagian hanya mencari keuntungan untuk keluarganya bukan untuk kesejahteraan masyarakat. Politik dinasti juga akan mengurangi kesempatan orang lain untuk menduduki jabatan, Mereka akan menempatkan keluarga atau saudaranya untuk menduduki jabatan strategis, meskipun mereka tidak memiliki integritas atau kemampuan dalam bidang pemerintahan. Kemungkinan besar rakyat hanya akan disuguhkan aktor-aktor politik yang itu-itu saja yang berasal dari satu keluarga, sehingga banyak orang kehilangan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya dalam bidang pemerintahan. Ketika masa jabatannya Seto Hadi telah berakhir, ia mencalonkan dirinya kembali sebagai kepala desa pada tanggal 15 Desember 2018. Dalam pencalonan kepala desa ini, calon atau jago yang muncul adalah dua orang. Dalam perkembangannya, pemerintahan sudah menganut suatu sistem pemerintahan yang demokratis. Kenyataannya yang terpilih ialah Seto Hadi dengan memperoleh suara 75% dari warga desa. Sisanya lebih memilih lawannya. Seperti hasil wawancara dengan Rudi selaku masyarakat desa setempat sebagai berikut:

“pada pemilihan kepala desa terdapat 2 (dua) calon, namun tetap saja Seto Hadi kembali memenangkan Pilkades. Kebanyakan masyarakat mengatakan menjadi kepala desa membutuhkan biaya yang cukup besar”.

Penulis, menemukan berdasarkan dari hasil penelitian bahwa masalah keuangan lah yang mendasari mereka untuk tidak mencalonkan diri dalam pilkades. Semakin sedikit calon makan

semakin besar biaya yang harus dikeluarkan untuk pendaftaran calon kepala desa tidak heran sebagian masyarakat lebih nyaman dengan pekerjaannya sekarang.

Penguasaan sumber-sumber ekonomi dalam suatu keluarga yang mengakibatkan semakin menunjukkan kelas mereka sangat mempengaruhi masyarakat. Kepala desa juga memiliki pekerjaan yang memang memiliki penghasilan yang terbilang cukup. Ia berkerja dalam bidang perkebunan, memiliki tanah perkebunan yang lumayan luas. Sebagian masyarakat mengatakan bahwa bersaing dengan kepala desa itu sebab mereka kalah bersaing dalam hal ekonomi yang di miliki. kemenangan kepala desa tidak lepas dari sosok mantan kepala desa yang merupakan paman Seto Hadi. Masyarakat seola terbiasa dengan kondisi ini dan menganggap sebagai suatu hal biasa. Gramsci juga berpendapat bahwa supermasi sebuah kelompok mewujudkan diri dalam dua cara, sebagai “omniasi” dan sebagai “kepemimpinan intelektual dan moral”. Disatu pihak sebuah kelompok sosial mendominasi kelompok-kelompok oposisi untuk menundukkan mereka, di lain pihak kelompok soial memimpin kelompok-kelompok kerabat dan sekutu mereka. Sebuah kelompok sosial bahkan harus menerapkan “kepemimpinan” sebelum memenangkan kekuasaan pemerintahan (kepemimpinan merupakan sarat utama untuk memenangkan kekuasaan). kelompok tersebut kemudian menjadi dominan ketika ia dapat mempraktekkan kekuasaan, tapi bahkan bila dia memegang kekuasaan penuh ditangannya dia masih harus “memimpin” juga.

Berdasarkan teori yang dikemukakan Gramsci tentang dominasi kekuasaan tersebut dapat dilihat dalam

pemerintahan Desa Mekar Jaya. Adanya dominasi dari kelompok-kelompok tertentu yaitu kelompok dari keluarga kepala desa yang menduduki jabatan-jabatan penting desa. kepala desa juga memiliki pengaruh untuk mempengaruhi kerabat mereka atau keluarga mereka. Agar tercipta suatu kekuasaan mereka menerapkan kepemimpinan. Kepemimpinan ini wujud dari adanya penguasaan jabatan tertinggi di desa dalam suatu keluarga tersebut. Kelompok ini kemudian menjadi dominan karena telah berhasil menerapkan atau mempraktekkan kekuasaan, bukan hanya sebagai pemegang kekuasaan saja tetapi mereka juga menjadi pemimpin di desa. Dalam sejarah pemerintahan di Desa Mekar Jaya bahwa jabatan kepala desa selama ini hanya ada di keluarga tersebut. Terbukti dengan dimulainya dari paman dan kemudian keponakan.

Kesimpulan dan Saran

- a) Faktor penyebab terjadinya politik dinasti di Desa Mekar Jaya Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur antara lain:
 1. Kekuatan modal (ekonomi), kemampuan ekonomi seorang kepala desa juga menjadi pertimbangan dalam pencalonan. Kekayaan yang dimiliki kepala desa merupakan modal dasar untuk mencapai suatu tujuan atau kemenangan.
 2. Kekuatan jaringan (keluarga), keluarga kepala desa memang memiliki pengaruh yang cukup besar di masyarakat. Seperti mantan kepala desa Terdahulu merupakan tokoh agama dan

Suroto meruakan orang yang cukup disegani di masyarakat selain itu jabatan-jabatan penting lainnya di desa seperti Kas Pemerintahan, Kaur Kesra, Rt. Kaur Umum masih memiliki hubungan kekerabatan.

3. Demokarsi tidak sehat, tidak jarang banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi pada masa kampanye berlangsung. Seperti yang terjadi di Desa Mekar Jaya untuk mempertahankan kekuasaannya terjadi kecurangan berupa uang (*money politic*).
- b) Dampak politik dinasti di Desa Mekar Jaya Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut:
 - 1) bahwa dampak yang terjadi akibat kepala desa melalui pengaruh keluarga besar dapat menguasai sumber ekonomi di desa.
 - 2) rendahnya tingkat pendidikan aparat pemerintahan desa juga menjadi faktor penentu kualitas pelayanan yang diberikan seperti kurangnya perhatian kepala desa dalam pembangunan seperti bangunan pukesmas, rusaknya jembatan, pembuatan surat KK dan lain-lain.

Referensi

- Agustino, Leo, (2011) *Sisi Gelap Otonomi Daerah: Sisi Gelap Desentralisasi di Indonesia Berbanding Era Sentralisasi*, Bandung: Widya Padjadjaran
- Arikunto, Suharsimi, (1989) *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiardjo, Mariam, (2008) *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Cipto, Bambang, (1999) *Indonesia Memasuki Era Politik Dinasti : Dari Bilik Suara Kemasa Depan Indonesia Potret Konflik Pasca Pemilu Dan Nasib Reformasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Gaffar, Afan, (2006) *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan, M. Iqbal, (2002) *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian atau Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hidayati, Nur, (2014) *Politik Dinasti dan Demokrasi Indonesia*, Semarang: Jurnal Politeknik Negari.
- Hariri, Mohammad, (2009) *Konsep Kepemimpinan negara Menurut Al-mawardi dan Implikasinya Pada Masa Daulah Abbasiyah*, (Jurusan Pemikiran Politik Islam UIN Raden Intan Lampung)
- Kartono, Kartini, (1996) *Pengantar Metode Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju.
-, (1983) *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: Rajawali), h. 38
- Moleong, Lexy J, (2001) *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mukhtar, (2013) *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta: Referensi.
- Mudzhar, Anto, (1998) *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Peaktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nawawi, Hadari, (1987) *Metode Penelitian Bidang Social*, Yogyakarta: Gama Press.
- Nurcholis, Hanif, (2011) *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga.
- Rivai, Veithzal, (2013) *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rozali, (2015) *Fenomena Dinasti Politik Pemerintahan Desa*, Tanjung Pinang: Jurnal Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Sayudi, (2014) *Bentuk dan Karakter Politik Dinasti di Indonesia*, Yogyakarta: Jurnal Hukum.
- Syarbaini, Syahrial, (2015) *Dilema Demokratisasi Indonesia Suatu Perkembangan Politik Pasca Orde Baru*, Jakarta: Jurnal Komunikasi Universitas Esa Unggul.
- Sony Tambunan, Toman, (2015) *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono, (2013) *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&R*, Bandung: Alfabeta.
- Suryanto, Bagong, (2005) *Metode Penelitian Sosial: Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana.